

8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LO
8 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst

8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO

8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO

8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO
8 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Dst
8 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO

8 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LO
8 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LO
8 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst
8 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 04	Dst
8 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO
8 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst
8 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO
8 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (Royalti) - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8 . 2 . 1 . 02 . 11	Dst
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LO
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktural Jalan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktural Irigasi - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktural Air Minum - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktural Sanitasi- LO
8 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO

8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Dst
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8 . 3 . 1 . 01 . 02	Dst
8 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst
8 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO

8 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst
8 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO
8 . 3 . 1 . 05 . 01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO
8 . 3 . 1 . 05 . 02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO
8 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO
8 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LO
8 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO
8 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LO
8 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Lainnya - LO
8 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8 . 4 . 1 . 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8 . 4 . 1 . 01 . 07	Dst
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8 . 4 . 2 . 01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8 . 4 . 2 . 01 . 08	Dst

8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO
8.5.1.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8.5.1.01.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
9	BEBAN
9.1	BEBAN OPERASI
9.1.1	Beban Pegawai - LO
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional - LO
9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO
9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras - LO
9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji - LO
9.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9.1.1.01.10	Beban Uang Paket - LO
9.1.1.01.11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9.1.1.01.12	Beban Tunjangan Komisi - LO
9.1.1.01.13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO
9.1.1.01.14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9.1.1.01.15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9.1.1.01.16	Beban Tunjangan Perumahan - LO
9.1.1.01.17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9.1.1.01.18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO
9.1.1.01.19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9.1.1.01.20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO
9.1.1.02.02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
9.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO
9.1.1.02.04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO
9.1.1.02.05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
9.1.1.03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9 . 1 . 1 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB - LO
9 . 1 . 1 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9 . 1 . 1 . 05 . 01	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 02	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 03	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 04	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO

9 . 1 . 1 . 06 . 02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhanan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

9 . 1 . 1 . 06 . 28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur - LO
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS - LO
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS - LO
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Dst
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Dst
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan

9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Dst
9 . 1 . 2 . 04	Beban Premi Asuransi
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....
9 . 1 . 2 . 05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9 . 1 . 2 . 05 . 08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9 . 1 . 2 . 06	Beban Cetak dan Penggandaan
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst
9 . 1 . 2 . 07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9 . 1 . 2 . 07 . 01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst
9 . 1 . 2 . 08	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9 . 1 . 2 . 08 . 03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...
9 . 1 . 2 . 09	Beban Sewa Alat Berat
9 . 1 . 2 . 09 . 01	Beban Sewa Eskavator
9 . 1 . 2 . 09 . 02	Beban Sewa Buldoser
9 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...
9 . 1 . 2 . 10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer
9 . 1 . 2 . 10 . 03	Beban Sewa Proyektor
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional

9 . 1 . 2 . 10 . 07	Dst
9 . 1 . 2 . 11	Beban Makanan dan Minuman
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Dst ...
9 . 1 . 2 . 12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9 . 1 . 2 . 12 . 03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst ...
9 . 1 . 2 . 13	Beban Pakaian Kerja
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst ...
9 . 1 . 2 . 14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Dst ...
9 . 1 . 2 . 15	Beban Perjalanan Dinas
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi

9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst ...
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst ...
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst
9 . 1 . 2 . 24	Beban Honorarium Non Pegawai
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Moderator
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....
9 . 1 . 2 . 25	Beban Honorarium PNS - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO
9 . 1 . 2 . 26	Beban Honorarium Non PNS - LO
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO

9 . 1 . 2 . 27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9 . 1 . 2 . 28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9 . 1 . 2 . 29	Beban Barang Dana BOS
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS
9 . 1 . 2 . 30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
9 . 1 . 2 . 30 . 02	Beban Operasional Pelayanan Kesehatan JKN
9 . 1 . 3	Beban Bunga
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Dst
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst
9 . 1 . 4	Beban Subsidi
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Dst
9 . 1 . 5	Beban Hibah
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Daerah kepada Pemerintah
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Dst ...
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst
9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9 . 1 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9 . 1 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9 . 1 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah

9 . 1 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9 . 1 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9 . 1 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api
9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9 . 1 . 7 . 01 . 33	Beban Penyusutan Amunisi
9 . 1 . 7 . 01 . 34	Beban Penyusutan Senjata Sinar
9 . 1 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9 . 1 . 7 . 02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9 . 1 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9 . 1 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9 . 1 . 7 . 02 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9 . 1 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan
9 . 1 . 7 . 02 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Candi
9 . 1 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
9 . 1 . 7 . 02 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9 . 1 . 7 . 02 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9 . 1 . 7 . 02 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9 . 1 . 7 . 03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
9 . 1 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan
9 . 1 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan
9 . 1 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9 . 1 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9 . 1 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9 . 1 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9 . 1 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9 . 1 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9 . 1 . 7 . 03 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9 . 1 . 7 . 03 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9 . 1 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih

9 . 1 . 7 . 03 . 12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9 . 1 . 7 . 03 . 13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9 . 1 . 7 . 03 . 14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9 . 1 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9 . 1 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9 . 1 . 7 . 03 . 17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan
9 . 1 . 7 . 03 . 18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9 . 1 . 7 . 03 . 19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9 . 1 . 7 . 03 . 20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9 . 1 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9 . 1 . 7 . 03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9 . 1 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9 . 1 . 7 . 04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9 . 1 . 7 . 04 . 01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi
9 . 1 . 7 . 04 . 02	Dstââââââââââ..
9 . 1 . 7 . 05	Beban Penyusutan Aset Lainnya
9 . 1 . 7 . 05 . 01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
9 . 1 . 7 . 05 . 02	Dstââââââââââ..
9 . 1 . 7 . 06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9 . 1 . 7 . 06 . 01	Beban Amortisasi Goodwill
9 . 1 . 7 . 06 . 02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise
9 . 1 . 7 . 06 . 03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9 . 1 . 7 . 06 . 04	Beban Amortisasi Paten
9 . 1 . 7 . 06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang
9 . 1 . 8 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9 . 1 . 8 . 01 . 03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9 . 1 . 8 . 01 . 05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9 . 1 . 8 . 01 . 06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9 . 1 . 8 . 01 . 07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9 . 1 . 8 . 01 . 08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9 . 1 . 8 . 01 . 09	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9 . 1 . 8 . 01 . 10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9 . 1 . 8 . 01 . 11	Dst.....
9 . 1 . 8 . 02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9 . 1 . 8 . 02 . 01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9 . 1 . 8 . 02 . 02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

9 . 1 . 8 . 02 . 03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9 . 1 . 8 . 02 . 04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
9 . 1 . 8 . 02 . 05	Beban Penyisihan Uang Muka
9 . 1 . 8 . 02 . 06	Dst.....
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain
9 . 1 . 9 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9 . 1 . 9 . 01 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9 . 1 . 9 . 02	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9 . 1 . 9 . 02 . 01	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9 . 1 . 9 . 03	Beban Lain-lain
9 . 1 . 9 . 03 . 01	Beban Lain-lain
9 . 2	BEBAN TRANSFER
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9 . 2 . 1 . 01 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
9 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9 . 2 . 2 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9 . 2 . 3 . 02 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst.....
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9 . 2 . 4 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....

9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07	Dst
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.2.01.08	Dst
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya
9.3.3.01.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.04	Dst
9.4	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1	Beban Luar Biasa
9.4.1.01	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01	Beban Tak Terduga
9.4.1.01.02	Beban Bencana Alam
9.4.1.01.03	Beban Luar Biasa Lainnya

/ BUPATI SUMBAWA, /


M. HUSNI DJIBRIL